



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENJAGA
LINTASAN KERETA API dan PT. KAI DALAM
KECELAKAAN KERETA API
(Studi Tentang Kecelakaan Kereta Api Akibat
Kelalaian Penjaga Lintasan Kereta Api di Pengadilan
Negeri Slawi).**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum
pada Universitas Negeri Semarang**

**PERPUSTAKAAN
UNNES**

**Oleh
Imam Candra Yustisianto**

3450406054

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2011

ABSTRAK

Yustisianto, Imam Candra. 2011. *“Pertanggungjawaban Pidana Penjaga Lintasan Kereta Api dan PT. KAI Dalam Kecelakaan Kereta Api (Studi Tentang Kecelakaan Kereta Api Akibat Kelalaian Penjaga Lintasan Kereta Api di Pengadilan Negeri Slawi)”*. Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Dosen Pembimbing I Dr. Indah Sri Utari, S.H.,M.H, Dosen Pembimbing II Anis Widyawati, S.H, M.H.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penjaga Lintasan, Kecelakaan Kereta api

Ketertinggalan dalam pengembangan teknologi perkeretaapian berdampak pada faktor kenyamanan dan keselamatan para pengguna jasa transportasi kereta api. Tingginya angka kecelakaan kereta api di Indonesia merupakan suatu permasalahan besar bagi PT. Kereta Api Indonesia (KAI) selaku regulator kereta api di Indonesia.

Permasalahan yang dimunculkan adalah: 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penjaga lintasan kereta api dalam kecelakaan kereta api di Pengadilan Negeri Slawi? 2. PT. KAI sebagai korporasi dalam kecelakaan kereta api di Pengadilan Negeri Slawi? 3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum perkeretaapian di Pengadilan Negeri Slawi selama ini? 4. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan PT.KAI dalam penegakan hukum perkeretaapian di Pengadilan Negeri Slawi? Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui sejauh mana seorang penjaga pintu lintasan kereta api dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana bila terjadi kecelakaan kereta api di Pengadilan Negeri Slawi. 2. Untuk mengetahui sejauh mana PT. KAI dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana bila terjadi kecelakaan kereta api di Pengadilan Negeri Slawi. 3. Untuk mengetahui yang menjadi kendala dalam penegakan hukum perkeretaapian di Pengadilan Negeri Slawi. 4. Untuk mengetahui apa saja upaya-upaya PT. KAI dalam penegakan hukum perkeretaapian di Pengadilan Negeri Slawi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada hukum, serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Slawi dan PT. KAI DAOP IV Semarang, Menggunakan studi pustaka baik berupa hasil wawancara, dokumen-dokumen, buku-buku literatur dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Adapun hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Seorang penjaga lintasan kereta api dapat dipertanggungjawabkan apabila : 1). Tidak ada alasan pemaaf. 2). Tidak ada alasan pembenar. 3). Kelalaian yang disengaja dalam melakukan tugas-tugas yang harus dilakukannya. 2. pertanggungjawaban pidana terhadap PT. KAI tidak dapat dilakukan karena penjaga lintasan pada saat terjadi kecelakaan melakukan inisiatifnya sendiri tanpa ada perintah dari pejabat PT.

KAI. 3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum perkeretaapian di Pengadilan Negeri Slawi yaitu : 1). Peraturan-peraturan tentang Perkeretaapian belum menempatkan aspek keselamatan pada posisi sangat utama. 2). karena adanya faktor dana yang cukup besar yang harus dikeluarkan oleh PT. KAI. 3). kesadaran hukum masyarakat setempat yang masih kurang.

Simpulan. 1. Seorang penjaga lintasan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum formil dan mempunyai kesalahan. 2. PT. KAI tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam kecelakaan kereta api yang diakibatkan kelalaian PJJ. Namun PT. KAI akan mendampingi proses hukum PJJ tersebut dari proses penyidikan sampai dengan menerima putusan tetap dari pengadilan. 3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum perkeretaapian di Pengadilan Negeri Slawi yaitu : 1). Peraturan-peraturan tentang Perkeretaapian belum menempatkan aspek keselamatan pada posisi sangat utama. 2). karena adanya faktor dana yang cukup besar yang harus dikeluarkan oleh PT. KAI. 3). kesadaran hukum masyarakat setempat yang masih kurang. Saran yang disampaikan oleh penulis adalah: (1). Perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan pegawai kereta api terutama bagi mereka yang bekerja di lapangan (2). walaupun PT. KAI tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebaiknya PT. KAI bertanggungjawab dengan membantu biaya yang telah ditimbulkan akibat kelalaian pegawainya kepada para korban. (3). Perlu adanya peraturan yang tunggal tentang perkeretaapian sehingga memudahkan bagi para pihak dalam bertindak. Para pihak dalam hal ini adalah PT.KAI, masyarakat umum serta para aparat penegak hukum.

